**BAB II**

**DAMPAK PERANG SAUDARA TERHADAP SIERRA LEONE**

1. **Perang Saudara (*civil war*)**
2. **Latar belakang terjadinya konflik**

 Konflik merupakan gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala dari konflik dan seringkali akar dari konflik tersebut tidak dapat diketahui sehingga menimbulkan kekerasan dari model yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.[[1]](#footnote-1) Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui konflik sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. **Coser** mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.[[2]](#footnote-2) Konflik dapat diartikan sebagai percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.[[3]](#footnote-3)

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.[[4]](#footnote-4) Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunnyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas dalam bentuknya yang ekstrem. Konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

1. **Bentuk Konflik**

Menurut **Soerjono Soekanto**, konflik sosial terbagi menjadi lima bentuk yaitu: [[5]](#footnote-5)

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.
6. **Faktor Penyebab Terjadinya Konflik**

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.[[6]](#footnote-6)

 Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: [[7]](#footnote-7)

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.
3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

 Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik.

Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu: [[8]](#footnote-8)

1. Dampak positif dari adanya konflik
2. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
3. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.
4. Dampak negatif dari adanya konflik
5. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
6. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.
7. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial.
8. **Pengertian Perang Saudara (konflik internal)**

 Menurut kaum fungsionalis, perang terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang kompleks dalam perangkat-perangkat pranata sosial yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya.[[9]](#footnote-9) Perubahan ini membawa konsekuensi perebutan sumber kebutuhan yang terbatas dan mengakibatkan terbukanya konflik. Fungsionalis juga mempunyai banyak persamaan dengan kaum sosiolog. Marxis yang secara tegas mengatakan bahwa fungsi utama dari pranata sosial adalah pemecahan terhadap segala kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan dan papan.[[10]](#footnote-10) Ketika dua atau lebih kelompok yang terlibat dalam perang saling berhadapan kemudian melakukan kontak satu dengan yang lain yang bersifat saling mengancam, menyakiti, menghancurkan dan saling mengontrol antara satu dengan yang lain, maka situasi seperti ini dikenal dengan konflik bersenjata atau sering juga dikenal sebagai konflik terbuka atau puncak dari sebuah krisis.

 Pencermatan terhadap konflik bersenjata dengan mengacu pada pendekatan “*inter-state system*” dapat dibuat klasifikasi yaitu, ada yang dapat dikenali sebagai konflik antar negara (*inter-state conflict*) dan konflik dalam wilayah atau (*intra-state conflict*) serta konflik yang merupakan gabungan dari keduanya. *Intra-state conflict* dapat didefinisikan sebagai konflik yang terjadi dalam wilayah suatu negara, biasanya konflik ini terdapat dalam dua bentuk.

* Pertama, konflik antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan yang memaksakan keinginannya untuk mendapatkan otonomi atau apa yang sering dikenal sebagai kelompok separatis.
* Kedua, konflik yang berkenaan dengan komposisi dan bentuk dari pemerintahan, yang biasanya melibatkan kelompok-kelompok sipil. Konflik ini biasanya mengacu pada garis kelompok etnik, bahasa, agama, dan budaya.

Jika konflik ini kemudian saling tumpang tindih dan akhirnya melampaui batas-batas negara, maka besar kemungkinannya konflik ini akan menjelma menjadi konflik antar-negara.[[11]](#footnote-11)

 Konflik juga dapat dikenali dari tingginya jumlah korban. Berdasarkan *The Swedish International Peace Research Institute (SIPRI)* dan *Departement of Peace and Conflict Research* di Universitas Upsala Swedia, misalnya memberi definisi dari kategori konflik. Definisinya didasarkan pada skala dari konflik dan besarnya jumlah korban dari konflik tersebut. Jika dalam sebuah konflik terlibat 1000 orang atau lebih, maka konflik tersebut dikategorikan sebagai sebuah perang atau konflik bersenjata yang besar. Apabila korbannya hingga 25 jiwa dan 1000 jiwa dalam tahun ke tahun dalam puncak konflik, kemudian dalam fase peperangan bisa melampaui 1000, maka ini dikenal dengan konflik yang menengah.[[12]](#footnote-12)

 Dilihat dari intensitas kerusuhan yang terjadi, jika hanya sesekali dan intensitasnya rendah, maka hal ini dikenal dengan *Low Intense Conflict* atau konflik dengan intensitas yang rendah. Sebaliknya, jika sebuah konflik sudah memiliki intensitas yang tinggi, mengakibatkan kerusakan yang besar dan memobilisasi kekuatan bersenjata, maka konflik ini disebut sebagai *Serious Dispute* atau perselisihan yang serius. Paska perang dingin, dalam lima dekade terakhir ini terjadi peningkatan yang luar biasa dari konflik-konflik *intra-state*. Bahkan frekuensi dari konflik *intra-state* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi dari konflik *inter-state.*[[13]](#footnote-13)

 Paska perang dingin ditandai dengan semakin meningkatnya perang sipil dan konflik bersenjata dalam negara yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional serta menyebabkan penderitaan umat manusia dalam jumlah yang besar.[[14]](#footnote-14)

 Konflik yang terjadi saat ini, dapat dikatakan sebagai konfllik atau perang model ketiga.[[15]](#footnote-15) Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebagai model yang pertama dan kedua. Jika pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II penyebabnya adalah faktor eksternal seperti politik, pertahanan, keamanan dan kepentingan ekspansi ekonomi dan ideologi, maka konflik model ketiga lebih banyak disebabkan oleh faktor internal dan primordial.

 Konflik internal terlihat lebih destruktif, tidak rasional dan tidak terkontrol karena :[[16]](#footnote-16)

1. Tidak adanya lembaga otoritatif yang *legistimate* atau resmi dalam negara yang mampu menekan kelompok-kelompok yang bertikai untuk menghentikan tindakan destruktifnya, apalagi jika pemerintah di negara tersebut juga merupakan bagian darinya.
2. Kesukaran pihak eksternal untuk langung melakukan intervensi kemanusiaan kedalam area konflik dengan alasan kedaulatan negara. Sebaliknya konflik juga akan semakin berlarut jika motivasi intervensi kemanusiaan disusupi oleh adanya kepentingan oportunistik.

 Kendati bersifat internal, akses dari konflik tersebut jauh lebih besar dari model perang klasik yang melahirkan dampak krusial bagi sistem keamanan dan juga perdamaian internasional, baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan juga militer. Akibat dari konflik internal yang sudah pernah terjadi, antara lain yaitu tewasnya jutaan orang seperti pada kasus di Rwanda, Burundi, Yugoslavia, Uni Soviet, Somalia dan masih banyak lagi. Bahkan sampai saat ini aliran arus pengungsi manusia yang belum tertangani akibat perang saudara atau konflik internal tersebut mencapai lebih dari 20 juta orang.[[17]](#footnote-17)

 Konflik internal merupakan pertikaian politik yang diikuti dengan kekerasan yang dapat dilacak pada umumnya berasal dari faktor-faktor yang bersumber dari dalam negara (*intra-state*) dari pada antar negara (*inter-state*).[[18]](#footnote-18) Yang termasuk dalam konflik internal antara lain adalah: *power struggle* yang melibatkan pemimpin-pemimpin sipil atau militer, ancaman-ancaman organisasi kriminal terhadap kedaulatan negara, dan pergerakan ideologi, konflik etnis dan juga kampanye-kampanye pemisahan diri dari suatu negara.

 Pada umumnya dalam konflik internal, aktor-aktor utamanya adalah pemerintah dan kelompok pemberontakan, tetapi ketika struktur negara lemah atau tidak ada, maka konflik horizontal antar kelompok dapat terjadi. Beberapa konflik internal juga didasarkan dari kombinasi permasalahan ideologi, kriminal, politik dan juga etnis serta beberapa konflik juga berubah-ubah.

 Menurut **Brown,** studi tentang konflik internal ini sangat penting untuk dibahas , tidak hanya dalam ilmu hubungan internasional tetapi juga dalam studi ilmu politik umumnya. Beberapa alasan dikemukakannya akan pentingnya konflik internal yaitu:[[19]](#footnote-19)

* Pertama, konflik internal telah banyak merambah ke berbagai negara dan menimbulkan aksi kekerasan di mana-mana.
* Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran yang dilakukan untuk mengalahkan pihak musuh.
* Ketiga konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan.
* Keempat, konflik internal juga penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional.
* Kelima, komunitas internasional terus berusaha menggalang kerjasama guna menyelesaikan konflik-konflik internal agar menjadi lebih efektif demi keamanan internasional.

 Secara umum, **Brown** mengidentifikasikan empat faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam konflik internal, yaitu; struktur, politik, sosial atau ekonomi dan kultur.[[20]](#footnote-20) Keempat faktor tersebut dapat menjadi penyebab utama (*underlying causes*) dan juga penyebab pemicu (*proximate causes*).

**Empat Faktor Penyebab Konflik Internal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Faktor** | ***Underlying Causes*****(Penyebab Utama)** | ***Proximate Causes*****(Penyebab Pemicu)** |
| **Struktur** | * Negara lemah
* Konsentrasi pada keamanan *intra-state* dan terjadinya *security dilemma*
* Demografi etnik
 | * Negara yang lumpuh (*collaps*)
* Perubahan perimbangan militer dalam negara
* Pola atau bentuk perubahan demografi
 |
| **Politik**  | * Diskriminasi politik
* Ideologi nasional
* Dinamika politik antar kelompok
 | * Transisi Politik
* Berkembangnya pengaruh ideologi atau paham nasional
* Bertumbuhnya kompetisi antar kelompok
* Pertentangan para pemimpin yang makin intensif
 |
| **Sosial dan Ekonomi** | * Masalah ekonomi
* Sistem ekonomi yang diskriminatif
* Modernisasi
 | * Permasalahan ekonomi yang memuncak
* Timbulnya kesenjangan ekonomi
* Percepatan pembangunan dan modernisasi
 |
| **Kultur atau Budaya** | * Diskriminasi budaya
* Masalah dalam sejarah (*problem historis*)
 | * Diskriminasi kultur yang makin intensif
* Pertentangan dan propaganda etnis
 |

 Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik internal adalah faktor struktur. Faktor ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Negara yang lemah, tingkat keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh setiap kelompok identitas yang berbeda, sehingga mengakibatkan dilemma pada keamanan dan geografik etnik. Negara yang lemah mengakibatkan institusi politik lemah, legitimasi rendah dan pemikiran politik yang terbagi-bagi. Sedangkan jika legitimasi melemah, maka kemampuan negara untuk mengatur masyarakatnya pun melemah, karena legitimasi pada dasarnya merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.[[21]](#footnote-21) Tetapi menurut **Max Webber**, tanpa adanya legitimasi, maka aturan, rejim atau pemerintahan yang ada akan mengalami kesulitan dalam mengelola konflik demi terciptanya stabilitas dan pemerintahan yang baik.[[22]](#footnote-22)
2. Konsentrasi pada keamanan kelompok tertentu akan menimbulkan dilemma keamanan dan ketegangan dengan kelompok lainnya yang berbeda identitas. Misalnya kelompok A akan menginterpretasikan konsentrasi pada keamanan yang dilakukan oleh kelompok B sebagai upaya mempersiapkan perang dan karenanya harus diimbangi dengan konsentrasi pada kekuatan pula. Begitu pula sebaliknya, meskipun belum tentu sesungguhnya konsentrasi tersebut dipersiapkan untuk perang, melainkan hanya sekedar untuk antisipasi atau upaya pertahanan belaka. Hal ini mengakibatkan setiap kelompok akan meningkatakn intensitas dan kekuatan militernya. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, ada kekhawatiran terjadinya penyerangan terhadap mereka. Kondisi seperti ini menimbulkan adanya suatu dilemma keamanan, yaitu contohnya bersiap diri dianggap memancing peperangan dan berdiam diri menjadi santapan mudah bagi lawan.
3. Adanya pembagaian atau pembatasan wilayah berdasarkan etnik tertentu atau demografi etnik.[[23]](#footnote-23) Sekelompok etnik yang secara khusus mendiami sebuah wilayah tertentu dalam suatu negara bisa menimbulkan ancaman pemisahan diri. Keinginan tersebut dapat terwujud dengan mudah karena mereka di dukung kekuatan infra dan supra struktur di dalam wilayah tersebut. Masalah menjadi rumit karena biasanya pemerintah pusat selalu menolak permintaan atas aksi memisahkan diri tersebut. Apabila negara yang bersangkutan memiliki institusi manajemen konflik yang sudah mapan, maju dan demokratis, maka konflik dapat di selesaikan secara positif atau konstruktif. Tetapi apabila itu terjadi dalam negara dunia ke tiga yang mayoritas nya belum mencapai pada tahap kematangan demokrasi, maka konflik akan menjadi negatif atau destruktif.

 Faktor ke dua penyebab terjadinya kekerasan dalam konflik internal adalah faktor politik. Faktor ini juga disebabkan oleh tiga hal, yaitu; diskriminasi, pertentangan mengenai ideologi nasional dan dinamika politik antar kelompok.[[24]](#footnote-24) Adanya diskriminasi politik dari pemerintah yang berkuasa atau kelompok mayoritas terhadap kelompok tertentu atau kaum minoritas akan menimbulkan solidaritas anggota kelompok etnis tertindas untuk melakukan perlawanan. Ideologi nasional dapat menjadi penyebab timbulnya kekerasan pada konflik internal apabila tidak menampung dan melindungi seluruh kepentingan kelompok dan identitas yang ada atau hanya di dasarkan pada kepentingan kelompok yang berkuasa saja. Begitu pula dinamika politik kelompok didasarkan pada semangat primordialisme maka aktivitas politik akan menjadi wadah bagi kekerasan. Tetapi sebaliknya, jika dinamika politik tersebut dibangun atas dasar kepentingan nasional secara keseluruhan, maka semua kepentingan masyarakat akan terwakili, sehingga kekerasan dapat dihindari.

 Sedangkan faktor ke tiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sosial dapat menyebabkan terjadinya konflik internal, apabila:[[25]](#footnote-25)

1. Negara atau masyarakat yang bersangkutan memiliki permasalahan ekonomi yang menumpuk, sehingga hal tersbut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menimbulkan berbagai gejolak dan tindakan kekerasan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, stagnan, merosot dan kolaps dapat membuat masalah destabilisasi semakin besar.
2. Sistem ekonomi yang berlaku sangat diskriminatif atau terjadi ketimpangan sosial yang tajam antara kelompok kaya dan kelompok masyarakat biasa.
3. Adanya modernisasi ekonomi dalam skala global yang memberikan dampak pada kehidupan ekonomi domestik. Modernisasi dapat menciptakan konflik apabila masyarakat tidak atau belum siap menghadapi perubahan yang ada secara drastis, sementara perubahan tersebut tidak mungkin dihindari.

 Faktor terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya konflik internal adalah kultur.[[26]](#footnote-26) Kultur dapat menjadi penyebab apabila terjadi diskriminasi budaya terhadap kelompok tertentu atau ada masalah dengan sejarahnya, yaitu antara satu kelompok dengan kelompok lain yang belum tuntas. Semakin kuat pemerintah pusat menekan atau mengabaikan inisiatif kelompok minoritas, maka semakin kuat pula radikalisasi pemisahan diri.[[27]](#footnote-27) Pertentangan yang melibatkan kultur ini memiliki dampak yang lebih besar disbanding faktor-faktor yang lain, karena pada dasarnya identitas kultur seseorang atau kelompok tidak akan pernah bisa diubah.

1. **Perang Saudara di Sierra Leone**

**1. Kronologis Konflik Internal Sierra Leone**

 Nama Sierra Leone diambil dari bahasa Portugis, yang berarti “singa gunung”, sesuai dengan deretan pegunungan menyerupai singa yang terletak di sepanjang semenanjung Freetown.[[28]](#footnote-28) Bangsa Portugis sendiri merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Sierra Leone. Wilayah Sierra Leone berbatasan dengan Liberia di bagian Tenggara, Republik Guinea di bagian Utara, serta dengan Samudera Atlantik di bagian Barat. Luasnya kurang lebih 72.325 km persegi, dengan populasi sekitar lima juta jiwa.[[29]](#footnote-29) Dari keseluruhan populasi di Sierra Leone, di bagian utara didominasi oleh mayoritas etnik Temne, sementara di bagian selatan dan tenggara didominasi oleh etnik Mende.[[30]](#footnote-30) Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, meskipun juga terdapat kelompok masyarakat yang beragama Kristen. Bahasa resmi yang digunakan di Sierra Leone adalah bahasa Inggris. Sejak tahun 1808, Freetown menjadi wilayah koloni Inggris dan di tahun 1896, seluruh wilayah Sierra Leone resmi menjadi koloni Inggris.[[31]](#footnote-31)

 Pada tahun 1930, telah ditemukan suatu deposit berlian dalam jumlah yang besar di bagian Timur Distrik Kono. Berlian ini kemudian menjadi komoditas ekspor terbesar di Sierra Leone, setelah kelapa sawit[[32]](#footnote-32). Selanjutnya di tahun 1933, di daerah Marampa, Distrik Port Loko, dibangun sebuah pertambangan biji besi, yang kemudian juga mempunyai peran yang signifikan dalam total ekspor dari Sierra Leone. Besi dan berlian kemudian menjadi dua komoditas utama yang pada akhirnya sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian Sierra Leone.[[33]](#footnote-33)

 Sekitar tahun 1951-1961 terjadi peralihan kekuasaan di Sierra Leone, dimana pemerintahan kolonial juga memberikan kursi pemerintahannya kepada beberapa warga negara Sierra Leone. Hal ini terlihat pada terpilihnya beberapa warga negara Sierra Leone yang menjadi menteri pada tahun 1953. Kementrian ini bertugas untuk mengatur pemerintahan dalam negeri, kecuali masalah hubungan luar negeri dan pertahanan.[[34]](#footnote-34) Dalam susunan kementrian tersebut Sir Milton Margai merupakan salah satu warga negara Sierra Leone yang ada di dalamnya dan menjabat sebagai Chief Minister.

 Sierra Leone memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1961, dan sejak itu Sierra Leone tetap mewarisi sistem pemerintahan parlementer, dengan Milton Margai yang merupakan pemimpin partai Sierra Leone People’s Party (SLPP), ditunjuk sebagai Presiden. Pada tahun 1964 Milton Margai kemudian meninggal dan posisinya digantikan oleh adiknya Sir Albert Margai, yang memimpin pemerintahan dari tahun 1964 sampai 1967. Pemerintahan Albert Margai ini, ditandai dengan adanya praktek korupsi dan upaya-upaya otoriter untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan juga untuk menyingkirkan pihak oposisi. Pada pemilihan umum tahun 1967, Gubernur Jenderal Sierra Leone menetapkan Siaka Stevens, yang merupakan pemimpin partai *All People’s Conggres* (APC), sebagai Presiden Sierra Leone berikutnya.[[35]](#footnote-35) Stevens pada awalnya merupakan sekretaris umum Serikat Pekerja Tambang dan pernah bergabung dalam SLPP, kemudian diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Tenaga Kerja, hingga pada akhirnya sesaat sebelum kemerdekaan Sierra Leone, Stevens keluar dan membentuk APC.

 Pada masa pemerintahannya di Sierra Leone, terdapat kesenjangan antara kelompok etnik Kreole di Freetown yang mendominasi sektor politik dan ekonomi di awal periode Kolonial selama 150 tahun dengan kelompok lainnya yang mempunyai tingkat kependudukan yang lebih tinggi dan bersifat *less developed*. Selain itu juga terdapat kesenjangan di bidang ekonomi dan politik antara wilayah bagian utara Sierra Leone yang didominasi oleh kelompok Temne dan Kriom, dengan wilayah bagian Selatan yang didominasi oleh kelompok yang menggunakan bahasa Mende.[[36]](#footnote-36) Selama memimpin, Stevens berhasil mengeksploitasi berlian, dengan cara mendekati para penambang gelap dan dengan membentuk *National Diamond Mining Company* (NDMC) untuk menasionalisasi SLST (*Sierra Leone Selection Trust*).[[37]](#footnote-37) Pada pertengahan 1980-an kondisi domestik di Sierra Leone, ditandai dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi dan menurunnya kekuasaan pemerintah, tidak tersedianya bahan pangan, meluasnya korupsi dan juga semakin tingginya tingkat pengangguran pada generasi muda serta meningkatnya gerakan radikalisme dari mahasiswa. Semakin memburuknya kondisi domestik Sierra Leone tersebut pada akhirnya membuat Stevens pensiun pada tahun 1985, dan ia menunjuk Mayor Jenderal Joseph Saidu Momoh menjadi penggantinya.

 Pada masa pemerintahan Momoh, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan kriminalitas, serta penggunaan obat-obatan terlarang, serta meningkatnya tingkat korupsi yang dilakukan olehnya.[[38]](#footnote-38) Lemahnya kepemimpinan dari Momoh ini, kemudian dimanfaatkan oleh dua pihak oposisi. Pertama; Kopral Foday Sankoh yang memimpin pemberontakan melalui Revolutionary United Front (RUF) dan didukung oleh pasukan pemberontak National People Front (NPFL) di Liberia. RUF merupakan sebuah kelompok pemberontak yang berasal dari spillover pemberontakan di negara tetangga Liberia. Pada tahun 1987, terjadi percobaan kudeta terhadap pemerintahan Momoh yang menandai awal dari kejatuhan pemerintahannya. Hal ini didukung dengan sikap dendam Charles Taylor, *warlords* / tokoh perang Liberia (menjadi presiden pada tahun 1997), yang diakibatkan oleh ditolaknya tawaran Taylor, untuk dapat beroperasi di sebelah Timur Sierra Leone dengan iming-iming uang, oleh Momoh.[[39]](#footnote-39) Pada tanggal 23 Maret 1991, RUF menyerang sebelah Timur Sierra Leone dari Liberia.

 Pada saat inilah konflik internal di Sierra Leone dimulai.[[40]](#footnote-40) Tujuan RUF melakukan aksi pemberontakan ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan rezim *All People’s Conggres* (APC) yang telah berlangsung kurang lebih 24 tahun di Sierra Leone.[[41]](#footnote-41) Kedua; Kapten Valentine Strasser yang memimpin kelompok yang terdiri dari para tentara, melakukan aksi kudeta militer.

 Pada tahun 1992, Strasser berhasil menjatuhkan pemerintahan Momoh dan kemudian memerintah negara melalui badan pemerintahan yang baru yaitu T*he National Provisional Ruling Council* (NPRC).[[42]](#footnote-42) Pada tahun 1992, Strasser berhasil menjatuhkan pemerintahan Momoh dan kemudian memerintah negara. Pada masa pemerintahannya, Strasser menyewa EO (*Executive Outcomes*), perusahaan keamanan tentara bayaran dari Afrika Selatan, dengan tujuan untuk membantu tentara pemerintahan Sierra Leone untuk melawan RUF.[[43]](#footnote-43) Namun demikian, Sankoh beserta RUF, terus melawan pemerintahan militer Strasser yang baru.

 Pada tahun 1996 diadakan pemilihan umum multipartai yang dimenangkan oleh Ahmad Tejan Kabbah yang merupakan pemimpin dari *Sierra Leone People’s Party* (SLPP), yang kemudian menjadi Presiden Sierra Leone berikutnya.[[44]](#footnote-44) Pada masa pemerintahannya, Presiden Kabbah menandatangani perjanjian damai Abidjan (Abidjan Peace Accord) dengan pihak RUF pada akhir November 1996. Perjanjian ini menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang netral, penarikan EO dan penarikan semua pasukan asing dari Sierra Leone.[[45]](#footnote-45) RUF merupakan pihak yang paling mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini, karena dalam perjanjian ini, dapat dikatakan bahwa RUF mempunyai posisi yang setara dengan pemerintah Sierra Leone. Selain itu RUF juga tidak dikenai sanksi atas segala aksi kekerasan yang dilakukan selama ini.[[46]](#footnote-46)

**2. Akar Permasalahan Konflik Sierra Leone**

 Greg Mitchell, menjelaskan mengenai eksploitasi berlian yang telah mencemari konflik internal di Sierra Leone. Menurut Mitchell, Sierra Leone adalah negara yang sangat kaya, namun diperintah oleh pemerintahan yang korup sehingga muncul gerakan pemberontakan revolusioner RUF yang meneror populasi sipil dan memperoleh keuntungan dari industri berlian Sierra Leone. Dalam tulisannya, Mitchell menjelaskan eksploitasi ekonomi terhadap berlian dalam tingkat lokal, regional dan internasional yang terjadi selama periode perang. Eksploitasi berlian itu sendiri dilakukan oleh RUF dan Presiden Liberia Charles Taylor.[[47]](#footnote-47)

 Selain menurut tulisan dari Greg Mitchell, adapun akar permasalahan konflik Sierra Leone yang lain yaitu faktor pemerintahan yang buruk. Secara umum akar permasalahan pada perang saudara di Sierra Leone telah dialami sejak awal pembentukan negaranya. Menurut Michael E.Brown kondisi domestik yang pada akhirnya dapat membawa suatu negara pada perang internal umumnya terletak pada persoalan mendasar yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Persoalan mendasar pada kasus perang saudara di Sierra Leone ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Bidang Politik dan Ekonomi

 Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan perdamaian di Sierra Leone harus diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar yang terjadi di negara tersebut.

1. Warisan Historis dari Pemerintah

 Selain faktor persoalan mendasar tersebut, faktor lain yang juga menjadi pemicu timbulnya konflik internal di Sierra Leone adalah warisan historis dari pemerintah, karena warisan historis tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, juga turut berperan dalam membentuk struktur politik dan ekonomi di suatu negara.

1. Perdagangan Budak

 Perang saudara yang berlarut-larut di Sierra Leone berhubungan erat dengan sejarah negara ini yang merupakan bekas koloni Inggris. Motif pemerintah Inggris mendirikan koloni di Sierra Leone adalah untuk kepentingan ekonominya.[[48]](#footnote-48) Sebagian besar penduduk asli di benua Afrika sejak tahun 1750 telah dijadikan komoditas utama perdagangan budak oleh pemerintah kolonial. Ketika tahun 1787 perbudakan mulai dihapuskan dan Sierra Leone dijadikan sebagai tempat penampungan bagi budak-budak yang dibebaskan, pemerintah kolonial Inggris tetap berperan dalam struktur pemerintahan yang baru dibentuk di negara tersebut. Faktor persediaan sumber daya alam yang melimpah, terutama tambang berlian di Sierra Leone menjadi alasan Inggris untuk tetap menjalankan peran sebagai pemerintah kolonial dan meraih keuntungan dari sumber daya alam tersebut.[[49]](#footnote-49) Atas dasar kepentingan ekonomi tersebut, maka peran pemerintah kolonial tidak dapat dipisahkan dari akar permasalahan yang terjadi dalam perang internal di Sierra Leone. Sejak periode perdagangan budak di benua Afrika, pertikaian antar kelompok etnik di Afrika sudah menjadi fenomena yang umum terjadi. Sebagian hal tersebut disebabkan oleh adanya politik “adu domba” dan kebijakan segregasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk menciptakan pertikaian antar kelompok etnik.[[50]](#footnote-50) Kebijakan ini diberlakukan agar antar kelompok etnis tersebut tidak dapat mengadakan konsolidasi untuk menciptakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Dengan demikian kepentingan ekonomi untuk mengambil penduduk asli sebagai komoditas perdagangan budak tidak akan terganggu. Tetapi untuk periode selanjutnya, kepentingan penguasaan sumber daya alam akan menjadi faktor yang lebih dominan bagi keterlibatan pemerintah kolonial, seperti Inggris, di benua Afrika.[[51]](#footnote-51)

1. Karakteristik pemerintahan

 Dalam kasus di Sierra Leone, paska pemberian kemerdekaan dari pemerintah Inggris, karakteristik pemerintahannya memiliki kesamaan pola. Pertama, di bidang politik sejak awal seluruh pemerintah yang memimpin di Sierra Leone memiliki persamaan dalam praktek penyelenggaraannya negara. Sentralisasi power pada kelompok politik tertentu, misalnya SLPP (*Sierra Leone People’s Party*) atau APC (*All People’s Conggres*), umumnya bernuansakan sentimen antar kelompok etnik meskipun secara keseluruhan sentralisasi ini tetap berfokus pada landasan penggolongan berdasarkan partai politik. Dalam hal ini setiap partai yang berkuasa di Sierra Leone memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dominasi kelompoknya dengan cara mengeliminir kelompok politik lainnya. Seringkali sentimen antar kelompok politik ini meluas pada kecenderungan untuk menekan kelompok etnik yang minoritas. Kecepatan dan kemudahan yang dialami oleh Sierra Leone dalam memperoleh kemerdekaan membuat negara ini harus menghadapi tantangan yang besar. Kebanyakan negara-negara Afrika baru tersebut ditinggalkan untuk memerintah negara mereka sendiri tanpa manajer dan teknisi yang memiliki kemampuan yang mencukupi, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Sierra Leone semakin melemah pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan kemudian hancur pada tahun 1990-an. 45 Kegagalan negara Sierra Leone tidak hanya didorong oleh kevakuman kekuasaan yang mendadak saja, tetapi juga berasal dari strategi para pemimpin politik yang disengaja untuk melemahkan struktur negara, pelayanan masyarakat dan institusi ketika mereka memonopoli dan mengekploitasi sumber daya ekonomi.[[52]](#footnote-52) Semua pemerintahan yang pernah berkuasa di Sierra Leone, tidak memiliki kesiapan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk memimpin Sierra Leone. Pada akhirnya hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan yang baik sehingga akibatnya Sierra Leone menjadi *collapse*/hancur dan lemah terhadap berbagai serangan pemberontakan yang berlarut-larut.[[53]](#footnote-53)

 Pergantian pemerintahan dari satu figur ke figur yang lainnya memenuhi kriteria yang lazim terjadi dalam politik di Afrika sebagai Big Man atau Strong Man. Figur pemimpin ini memiliki kemampuan untuk menguasai massa, cenderung manipulatif dalam memanfaatkan kelompok pendukungnya, dapat menjalankan kepemimpinannya secara otoriter ataupun dengan persuasif sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.[[54]](#footnote-54) Pemimpin dengan model Big Man ini seringkali memegang kursi pemerintahan di banyak negara-negara Afrika, demikian pula halnya dengan yang terjadi di Sierra Leone. Sejak awal Albert Margai, Siaka Stevens, dan pemimpin Sierra Leone berikutnya memiliki kecenderungan untuk hal tersebut.

3.Faktor Berlian

 Permasalahan dalam sektor berlian, baik secara langsung atau tidak langsung telah mencemari konflik di Sierra Leone.

* Pertama, berlian adalah insentif untuk melakukan kekerasan. Hal ini dipraktekkan baik oleh RUF dan tentara pemerintah. Kedua kelompok ini menunjukkan ketertarikan dalam penambangan berlian secara illegal. Pertempuran yang teratur dalam konflik internal ini memang jarang terjadi, namun pertempuran yang terjadi seringkali berlokasi di sekitar wilayah berlian. Ribuan penduduk sipil telah dijauhkan dan diusir dari wilayah yang kaya akan berlian oleh para pemberontak RUF.[[55]](#footnote-55)
* Kedua, berlian telah membantu dalam hal pembiayaan aksi kekerasan. Kelompok RUF telah menggunakan berlian untuk membeli persenjataan, baik dari tentara pemerintah maupun dari luar negara. Sejumlah pedagang berlian yang ikut memperoleh keuntungan dari aksi kekerasan, juga membantu membiayai aksi pemberontakan RUF.[[56]](#footnote-56)
* Ketiga, berlian juga telah membantu memperburuk konflik karena telah menimbulkan frustrasi yang diakibatkan oleh keuntungan yang tidak seimbang dari penambangan berlian. Secara historis, keuntungan berlian telah diperoleh lebih banyak oleh pihak luar. Alluvial Diamond Mining Scheme yang dibentuk pada tahun 1955 telah menciptakan kesempatan penambangan legal oleh penduduk lokal, namun demikian pada prakteknya yang mampu membeli perijinan dan peralatan dasar yang diperlukan adalah para pedagang, polisi setempat, para pejabat dan pegawai sipil. Mereka ini kemudian membagi keuntungan kepada rakyat biasa dengan syarat rakyat biasa berkewajiban untuk menggalinya.[[57]](#footnote-57)

 Warga Lebanon di Sierra Leone kemudian menggunakan akses superiornya untuk memperoleh modal sehingga dapat mendominasi sektor pertambangan berlian lokal yang baru. Di sisi lain, Siaka Stevens pada saat itu menawarkan kekebalan kepada para pendukung yang loyal pada penggalian berlian illegal. Sementara itu, para pemimpin di wilayah berlian menjadi semakin kaya karena berlian dan memperoleh keuntungan dari kemampuan mereka dalam mengolah perijinan dan menguasai wilayah yang terbaik. Keluarga penguasa pasti mempunyai hak kepemilikan di tanah yang kemudian akan mereka sewakan kepada orang lain berdasarkan keturunan, dimana kepemilikan utama tetap dipegang oleh keluarga penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka.[[58]](#footnote-58)

 Rendahnya pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah dari penambangan berlian juga menjadi pemicu timbulnya konflik internal. Berlian selalu menjadi hal penggoda bagi para penyelundup karena bentuknya yang sangat kecil dan nilainya yang sangat berharga.[[59]](#footnote-59) Cara penyelundupan berlian hingga sampai ke pasar internasional ditentukan oleh kemudahan mereka untuk dibawa keluar dari satu negara ke negara lain secara tersembunyi. Perbatasan negara yang melintasi batas daratan Afrika Barat sangat lemah dan terisolasi sehingga para penyelundup, imigran dan pedagang dengan mudah dapat menyeberangi perbatasan untuk membawa barang-barang selundupan ke pasar.[[60]](#footnote-60)

 Pada jalur perlintasan resmi antara Sierra Leone, Guinea dan Liberia, terdapat 60-80 perbatasan yang tidak dijaga melalui semak-semak yang lebat, menyeberangi sungai dan melalui pegunungan, dimana ribuan mil dari daerah perbatasan sangat lemah dalam hal penjagaan sehingga seringkali terjadi penyelundupan berskala besar.[[61]](#footnote-61) Arus berlian selundupan yang keluar dari Afrika Barat sangat sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga komunitas internasional enggan menyalahkan penyelundupan kepada aktor lokal dan regional. Pada tahun 1999, ekspor resmi berlian Liberia hanya 8500 karat, padahal sebenarnya jumlah berlian yang diselundupkan hampir mencapai 80.000 karat.[[62]](#footnote-62) Secara historis, Liberia telah menjadi jalur utama bagi para penyelundup berlian. Liberia memperoleh berlian selundupan dari para penambang gelap di Sierra Leone dan juga dari kelompok pemberontak RUF. Dari Liberia, berlian dapat dijual dengan mudah karena dollar Amerika adalah mata uang resminya dan dalam penjualannya hanya ada sedikit pengawasan dari Tel Aviv dan Antwerp.[[63]](#footnote-63) Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara tingkat lokal, regional dan internasional dalam hal penyelundupan berlian.

 Perdagangan berlian adalah sebuah masalah yang sangat mengkhawatirkan karena adanya pencemaran ekonomi (selama berlangsungnya konflik tersebut, dapat dilihat bahwa akibat keuntungan yang besar dari berlian, rakyat Sierra Leone mengalami terror, pembunuhan dan kemiskinan) dalam konflik di Sierra Leone, yang sebagian besar disebabkan oleh berlian.[[64]](#footnote-64) Hal ini semakin memperburuk perekonomian Sierra Leone karena perang internal tersebut, sehingga Sierra Leone tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia, menurut Bank Dunia.[[65]](#footnote-65)

1. **Dampak Perang Saudara di Sierra Leone**

Perang saudara yang terjadi di Sierra Leone memberikan dampak besar pada negaranya, timbulnya kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan dan penurunan kesehatan penduduk Sierra Leone membuktikan bahwa dampak perang yang dialami oleh negara ini bukanlah dampak yang kecil, terutama pada masalah kesehatan penduduk Sierra Leone.

 Dari 12 negara-negara di Afrika yang memberikan fokus tentang *US President’s Emergency Plan for AIDS Relief,* hanya dua negara di Afrika Barat yaitu Pantai Gading dan Nigeria.[[66]](#footnote-66) Di kawasan Afrika Barat terdapat tiga faktor yang dikaitkan dengan penyakit lintas batas tentang wabah dari virus HIV/AIDS, yaitu *Arms Conflict* (melalui perilaku seksual antara tentara dan para militer) dan tingginya tingkat migrasi penduduk yang disebabkan oleh perang saudara, *peace operations* di antara kedua intuisi yaitu ECOWAS dan PBB, serta migrasi tenaga kerja di sepanjang rute yang di dalam kawasan Afrika Barat.

1. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2011), hal 345. [↑](#footnote-ref-1)
2. Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1998),hal.156 [↑](#footnote-ref-2)
3. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2005), hal 68.23 [↑](#footnote-ref-3)
4. Robert lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, (Jakarta:universitas terbuka

1994).hal.53. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal.86.

10 Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001),

hal.102. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hal 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68. [↑](#footnote-ref-7)
8. Astrid Susanto, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, (Bandung:Bina Cipta, 2006), hal.70. [↑](#footnote-ref-8)
9. Seymour Martin Lipset, Consensus and Conflict, Essays in Political Sociology, New Jersey, 1985, hal.48. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. I Nyoman Sudira, Teori Konflik: Sebuah Penghampiran dan Dasar Pemahaman dalam *Jurnal Pacis* No.2 Thn 1, 2003, hal 60. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Penelitian yang dilakukan oleh Wallensteen dan Sollenberg menunjukan bahwa dari 110 konflik utama yang melibatkan kekerasan bersenjata pada tahun 1990-1999, hanya 7 konflik yang merupakan konflik antar negara (interstate) dan 103 sisanya merupakan konflik internal. Kecuali kasus Perang Teluk dan Afghanistan, hampir semua perang yang terjadi pasca Perang Dingin merupakan konflik internal dalam suatu negara, sedangkan konflik klasik antar negara sangat jarang terjadi. (Andi Widjajanto, “Perang Internal dalam Proses Pembentukan Negara-Bangsa” dalam Analisis CSIS, tahun XXX/2016, No.1 hal 46) [↑](#footnote-ref-14)
15. K.J.Holsti, *The State, War & The State of War,* Cambridge: CUP, 1996, hal 28-40. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hans Arnold, “*The Century of the Refugee”*, dalam *A European Country Auseen Pol,* Vol. 42 No.3 Quarter 1991, hal 275. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Michael E.Brown, “Ethnic and Internal Conflict”, dalam Chester A. Crocker, Fen Osler, Hampson, dan Pamela A all(ed)., Turbulant Peace: The Callenges of Managing International Conflict, (Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 2001), hal.212. [↑](#footnote-ref-18)
19. Michael E.Brown (eds), *The International Dimensions of Internal Conflict,* Cambridge: MIT Press, 1996, hal.13-14. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* Gramedia, Jakarta 1992. [↑](#footnote-ref-21)
22. Joseph Bensman, “Max Webber’s Concept of Legitimacy; An Evaluation”, dalam Arthur J.Vidich dan Ronald M. Glassman (eds), *Conflict and Control: Challenge to Legitimacy of Modern Governments,* California: Sage Publication, 1979, hal 17-47. [↑](#footnote-ref-22)
23. Op.Cit, Michael Brown (eds), *The International Dimensions of Internal Conflict*, hal.17. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, hal 18-19. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wolfgang Danspeckgruber, “Self-Determination, Self-Govermance and Security”, International Relation, Vol.XV, No.1, April 2000, hal.18 [↑](#footnote-ref-27)
28. “Sierra Leone”, <http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/sierra_leone.htm> diakses pada Tanggal 27 Februari 2016, pkl. 08.07. [↑](#footnote-ref-28)
29. “Profile Sierra Leone”, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm> diakses pada Tanggal 27 Februari 2016, pkl 16.35. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. John L. Hirsch, 2001, “Sierra Leone: Diamonds and the struggle for Democracy.” , *International Peace Academy Ocassional Paper Series,* hal. 25-31. [↑](#footnote-ref-32)
33. Op. *Cit*., “Profile Sierra Leone”. [↑](#footnote-ref-33)
34. “Profile Sierra Leone : Government and Political Condition”, pada <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/govtpol.htm>, diakses pada 11 Februari 2016, pkl 23.46. [↑](#footnote-ref-34)
35. David Zimmer, “Harvard WORLDMUN 2003 : Special Political and Decolonization Committee.” , hal.7 , dalam <http://www.worldmun.org/2006/archives/03/gSpPECPOL.pdf> , diakses pada Tanggal 11 Februari 2016, pkl 23.04. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abbas Bundu, Democracy by Force? A Study of International Military Intervention in the Civil War of Sierra Leone from 1991-2000 (USA : Universal Publishers, 2001), hal. 16-17. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ian Smillie dkk., January 2000, “*The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds and Human Security.”,* hal 18. [↑](#footnote-ref-37)
38. Robert I. Ritberg, “Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators.” dalam Rotberg, 2003, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror* , World Peace Foundation, Brooking Institution Press, hal. 5-10. [↑](#footnote-ref-38)
39. Op.*Cit.* John L. Hirsch, 2001, “*Sierra Leone: Diamonds and the struggle for Democracy.”* Hal. 30. [↑](#footnote-ref-39)
40. “Report of the Panel of Experts.” , Appointed Pursuant to UNSC Resolution 1306, 2000, paragraph 19, in relation to Sierra Leone, Desember 2000. [↑](#footnote-ref-40)
41. Radhika Coomaraswamy, “*War-Related Sexual Violence in Sierra Leone “*, pada situs <http://www.phursa.org/research/sierra_leone/pdf_files/06_respon.pdf> , diakses pada Tanggal 27 Februri 2016, pkl. 21.10. [↑](#footnote-ref-41)
42. Joe A.D. Alie, “Background to the Conflict (1961-1991): What Went Wrong and Why?” dalam Anatole Ayissi dan Robin-Edward Paulton, Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone (Jenewa: UNIDIR, 2000), hal. 15. [↑](#footnote-ref-42)
43. “Chronology of Sierra Leone: How Diamonds Fuelled the Conflict”, pada <http://www.africa-confidential.com/special.htm>, diakses pada 11 Februari 2016, pkl. 23.40. [↑](#footnote-ref-43)
44. Paul Richards, Agustus 2003, “*The Political Economy of Internal Conflict in Sierra Leone ,”* Working Paper Series, Working Paper 21, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, Conflict Research Unit, hal. 9-10, dalam <http://www.clingandael.nl/publications/2003/20030800_cru_working_paper_21.pdf> , diakses pada 27 Februari, pkl. 23.41. [↑](#footnote-ref-44)
45. A. Adebajo, *Building Peace in West Africa : Liberia, Sierra Leone , and Guinea-Bissau, London,* 2002. [↑](#footnote-ref-45)
46. “Chronology of Sierra Leone : How Diamonds Fuelled the Conflict”, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-46)
47. Greg Mitchell, Maret 2005, “Terrorist Prefer Diamonds : How Predation, State Collapse and Insurgence Have Fashioned The International Exploitation of Sierra Leone’s War Economy,” Peace Studies Paper, Working Paper 8, Fourth Series, Departement of Peace Studies , University of Bradford, lihat <http://www.brad.ac.uk/acad/peace/pubs/psp8_title.pdf>, diakses pada 01 Februari 2016, pkl. 21.30. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Op.Cit,* John L. Hirsch , hal. 25. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
50. Crawfrod Young, “The Herittage of Colonialism”, dalam John W. Harbeson & Donald Rothschild (eds.), Africa in World Politics (Boulder: Westview Press) 1991, hal.19. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
52. William Reno, “Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society”, dalam Robert I. Ritberg, State *Failure and State Weakness in a Time of Terror*, World Peace Foundation, Brooking Institution Press, 2003, hal 5-10. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-53)
54. Hirsch, *Op.Cit*, hal 29. [↑](#footnote-ref-54)
55. Amanda Bryant Banat, 2002, “*Solving the Problem of Conflict Diamonds in Sierra Leone: Proposed Market Theories and International Legal Reqruitments for Certification of Origin,”* Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 19, No.3, hal.940-942, dalam <http://www.law.arizona.edu/Journals/AJICL/AJICL2002/vol193/Banatone.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ibid. [↑](#footnote-ref-56)
57. Chaim Even Zohar, 2003, “*Sierra Leone Diamond Sector Financial Policy Constraints,”* USAID, Appendix A: A Brief History of Sierra Leone Diamond Industry, hal.31-32, dalam <http://www.peacediamonds.org/data/2351648_Financial%20Constraints%20Study%20--%20internet.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibid. [↑](#footnote-ref-58)
59. David Keen, *“Greedy Elites, Dwinding Resources, Alienated Youths The Anatomy of Protracted Violence in Sierra Leone,”* hal.1-3, dalam <http://www.fes.de/jpg/ONLINE2_2003/ARTKEEN.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid. [↑](#footnote-ref-60)
61. “*Potential Diamonds Anti Smuggling Activities For Consideration in Sierra Leone”,* Oktober 2004, USAID, hal.10, dalam <http://pdf.dec.org_docs/PNADB147.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-61)
62. *“Part One: Diamonds,”* Report of The Panel of Expert, Appointed Pursuant to U.N. Security Council Resolution 1306 (2000)., Paragraph 19, in Relation to Sierra Leone, December 2000. [↑](#footnote-ref-62)
63. Perez Katz, Anna M., “*The Role of Conflict Diamonds in Fuelling Wars in Africa: The Case of Sierra Leone”,* International Affairs Review, Vol.XI, No.1, Winter/Spring 2002, dalam <http://www.gwu.edu/-iar/WS02_Perez-Katz.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ian Smillie dkk. *Op. Cit,* hal.10 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibid. [↑](#footnote-ref-65)
66. <http://rezarakhman.blogspot.co.id/2015/01/perubahan-konstruksi-dari-HIV/AIDS-ke-Ebola>, diakses pada 5 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-66)